

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan, pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan yang besar dalam suatu struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kesenjangan sosial yang absolut. Pembangunan selalu dihubungkan dengan suatu perubahan kondisi kepada situasi dan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah bahkan cenderung memiliki konotasi positif, yaitu suatu pertumbuhan dan masa depan yang lebih baik. Berbagai interpretasi juga dilontarkan dengan berbagai argument yang mampu menggiring pada pemikiran bahwa pembangunan selalu membawa kebaikan. Namun era globalisasi dan komunikasi mampu seolah membenarkan pemahaman tersebut. Kadang peningkatan pendapatan per kapita atau Gross Domestic Product (GDP) selalu dapat dijadikan ukuran pembangunan, padahal tidak jarang kesenjangan sosial juga sering mengiringi pembangunan apabila yang terjadi justru ketidakmerataan pendistribusiannya.

Secara ekonomi makro tujuan perkembangan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks masyarakat sebagai objek pembangunan, diperlukan suatu indikator untuk mengukur besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator keberhasilan suatu negara atau daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di setiap negara. Upaya pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai (Amri, 2017).

Menurut Todaro dan Smith (2011) kesejahteraan manusia berarti menjadi baik, yang dalam pengertian dasar berarti sehat, menyantap makanan yang bernutrisi, berpakaian pantas, melek aksara, dan panjang umur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang membuat individu memiliki perasaan senang, damai, dan termasuk juga didalamnya kesejahteraan, kedamaian pikiran, dan kepuasan hidup.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi tercukupinya hajat hidup yang mencakup pendapatan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dalam hal ini, pemerintah pusat & daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan kelayakan hidup tersebut (Andi Meutha, 2019). Pada hakikatnya, pembangunan nasional bertujuan sebagai perwujudan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera (Wahyudi et al., 2022).

Dalam konteks masyarakat sebagai objek pembangunan, maka diperlukan suatu indikator untuk mengukur perkembangan kehidupan atau tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu indikator kesejahteraan adalah indeks kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan bagian dari kesejahteraan, dan kebahagiaan yang lebih besar dapat memperbesar kapabilitas manusia untuk berfungsi. Menurut Furnham (1995) kebahagiaan merupakan bagian kesejahteraan, *contentment, to do your life satisfaction or equally the absence of psychology distress*. Kebahagiaan yang merupakan sesuatu yang pencapaian tujuannya dikarenakan kebahagiaan selalu dihubungkan dengan kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang lebih tinggi serta tempat kerja yang lebih baik. Kebahagiaan adalah ketentraman dan kesenangan hidup lahir batin, kemujuran dan keberuntungan yang bersifat lahir batin. Kebahagiaan menurut filsafat *Suryomentaraman* adalah keadaan tidak terikat sesuatu, bebas dari keinginan yang tidak pada tempatnya, tidak berkonflik, kondisi nyaman dan tentram (Rahayu, 2016).

Penilaian indeks kebahagiaan mulai dipakai di Indonesia, Thailand, Malaysia,

Australia, Prancis, dan Inggris pada tahun 2011 saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia telah memakai metode survei dalam menghitung indeks kebahagiaan di Indonesia. Untuk mengukur kesejahteraan tersebut Indonesia memiliki indikator yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan yaitu Indeks kebahagiaan atau yang sering disebut sebagai *index of happiness*. Indeks kebahagiaan manusia adalah ukuran kebahagiaan yang memperhitungkan tiga aspek kehidupan: aspek makna hidup (*eudaimonia*), aspek perasaan (*affect*), dan aspek kepuasan hidup (*life satisfaction*). Pentingnya indeks kebahagiaan tidak menunjukkan bahwa indikator kebahagiaan harus menggantikan indikator ekonomi sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan dalam pembangunan, melainkan harus digunakan sebagai pelengkap (Firmansyah, 2017).

BPS telah melakukan pengembangan untuk mengukur seberapa bahagia masyarakat Indonesia. Berdasarkan kajian dengan representasi dari estimasi di tingkat nasional, indeks kebahagiaan Indonesia pertama kali dipublikasikan pada tahun 2013. Melalui 2 Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) tahun 2014 dengan wilayah sampel yang digunakan untuk estimasi di tingkat nasional dan provinsi, BPS kembali melakukan pengukuran ulang tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia (BPS, 2015). Pengukuran ini bersifat subjektif, oleh karenanya dapat dikatakan bahwa indeks kebahagiaan dalam penelitian ini merupakan pengembangan indikator kesejahteraan subjektif yang digunakan untuk melengkapi data objektif.

Tabel 1. 1 Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi Tahun 2014, 2017 dan 2021

No	Provinsi	2014	2017	2021
1	ACEH	67,48	71,96	71,24
2	SUMATERA UTARA	67,65	68,41	70,57
3	SUMATERA BARAT	66,79	72,43	71,34
4	RIAU	68,85	71,89	71,8
5	JAMBI	71,1	70,45	75,17
6	SUMATERA SELATAN	67,76	71,98	72,37
7	BENGKULU	67,43	70,61	69,74
8	LAMPUNG	67,92	69,51	71,64
9	KEP. BANGKA BELITUNG	68,45	71,75	73,25
10	KEP. RIAU	72,42	73,11	74,78
11	DKI JAKARTA	69,21	71,33	70,68
12	JAWA BARAT	67,66	69,58	70,23
13	JAWA TENGAH	67,81	70,92	71,73
14	DI YOGYAKARTA	70,77	72,93	71,7
15	JAWA TIMUR	68,7	70,77	72,08
16	BANTEN	68,24	69,83	68,08
17	BALI	68,46	72,48	71,44
18	NUSA TENGGARA BARAT	69,28	70,7	69,98
19	NUSA TENGGARA TIMUR	66,22	68,98	70,31
20	KALIMANTAN BARAT	67,97	70,08	72,49
21	KALIMANTAN TENGAH	70,01	70,85	73,13
22	KALIMANTAN SELATAN	70,11	71,99	73,48
23	KALIMANTAN TIMUR	71,45	73,57	73,49
24	KALIMANTAN UTARA	-	73,33	76,33
25	SULAWESI UTARA	70,79	73,69	74,96
26	SULAWESI TENGAH	67,92	71,92	74,46
27	SULAWESI SELATAN	69,8	71,91	73,07
28	SULAWESI TENGGARA	68,66	71,22	73,98
29	GORONTALO	69,28	73,19	74,77
30	SULAWESI BARAT	67,86	70,02	73,46
31	MALUKU	72,12	73,77	76,28
32	MALUKU UTARA	70,55	75,68	76,34
33	PAPUA BARAT	70,45	71,73	74,52
34	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-
35	PAPUA	60,97	67,52	69,87
36	PAPUA SELATAN	-	-	-
37	PAPUA TENGAH	-	-	-
38	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-
INDONESIA		68,28	70,69	71,49

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa hasil tiga kali survey pada tahun 2014, 2017, dan 2021 Indeks Kebahagiaan di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2014 Indeks Kebahagiaan tercatat sebesar 68,28%, kemudian 2017 sebesar 70,69%, dan 2021 sebesar 71,49%. Jika dilihat berdasarkan sebaran daerah, masyarakat dengan tingkat kebahagiaan tertinggi berada di luar Jawa-Bali. Dari survey 2021, provinsi dengan Indeks Kebahagiaan tertinggi secara berurutan ialah Maluku Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Indonesia merupakan negara yang memiliki 6 pulau. Salah satu pulau yang perlu diperhatikan untuk dilakukan perbaikan dalam upaya peningkatan kebahagiaan penduduk yaitu Pulau Sumatera, hal ini dikarenakan masih banyaknya Provinsi di Pulau Sumatera yang pencapaian indeks kebahagiaannya dibawah rata-rata angka nasional. Sumatera adalah pulau keenam terbesar di dunia yang terletak di Indonesia dengan luas 473.481 km². Penduduk pulau ini sekitar 57.940.351, terdapat 10 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Pencapaian indeks kebahagiaan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014, 2017, dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Indeks Kebahagiaan Provinsi Sumatera Tahun 2014, 2017 dan 2021

No.	Provinsi	2014	2017	2021
1	ACEH	67.48	71.96	71.24
2	SUMATERA UTARA	67.65	68.41	70.57
3	SUMATERA BARAT	66.79	72.43	71.34
4	RIAU	68.85	71.89	71.8
5	JAMBI	71.10	70.45	75.17
6	SUMATERA SELATAN	67.76	71.98	72.37
7	BENGKULU	67.43	70.61	69.74
8	LAMPUNG	67.92	69.51	71.64
9	KEP. BANGKA BELITUNG	68.45	71.75	73.25
10	KEP. RIAU	72.47	73.11	74.78
Rata-Rata		68.59	71.21	72.19

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Kebahagiaan di Pulau Sumatera pada tahun 2014 sebesar 68,59%, pada tahun 2017 sebesar 71,21%, dan 2021 sebesar 72,19%. Selama periode 2014, 2017 dan 2021 pertumbuhan indeks kebahagiaan di beberapa Provinsi mengalami penurunan. Provinsi dengan pertumbuhan indeks kebahagiaan yang menurun antara lain Aceh sebesar 0,72%, Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 1,09%, dan Provinsi Bengkulu mengalami penurunan sebesar 0,87%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kebahagiaan penduduk di Pulau Sumatera belum merata dapat dirasakan oleh beberapa Provinsi.

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumberdaya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan. Kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat meliputi semua bentuk intervensi sosial dengan tujuan utama pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat yaitu terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup. Dengan kemajuan perkembangan dunia sekarang, muncul beragam masalah di kehidupan sosial masyarakat sehari-hari maupun bernegara dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian pada aspek sosial dan pembangunan. Kemajuan pembangunan ekonomi yang selama ini diukur dari indikator ekonomi seperti penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dianggap belumlah cukup dalam mempresentasikan kesejahteraan suatu penduduk negara. karena pendekatan ekonomi tersebut umumnya hanya mengukur secara objektif berbasis uang saja (*Monetary-base indikator*).

Penelitian oleh Yasir et al., (2022) mengkaji sejumlah aspek yang berpengaruh ke kebahagiaan yakni keadaan lingkungan, aset, kondisi rumah, pendapatan rumah tangga, pekerjaan, serta pendidikan. Kelima aspek ini melingkupi dimensi kepuasan hidup. Banyak faktor yang dapat digunakan dalam pengukuran indeks kebahagiaan salah satunya adalah pendidikan dimana Kebahagiaan memiliki efek positif pada pendidikan. Salah satu bidang penting yang memberikan dampak terbesar dalam peningkatan kualitas SDM adalah bidang pendidikan dengan premis jika seseorang yang tingkat kesadarannya makin tinggi

dalam segala aspek berarti tingkat pendidikan orang itu semakin tinggi (Firmansyah, 2017).

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam keberlangsungan suatu bangsa. Melalui pendidikan inilah pembangunan suatu negara dapat dikatakan maju yang mana semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai juga semakin memudahkan seseorang untuk mencapai kesejahteraan (Suroso, 2019). Pembangunan pendidikan nasional ditujukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi bangsa yang beradab dan mampu bersaing di dunia internasional (Saepudin et al., 2023).

Salah satu indeks yang juga dipakai dalam pengukuran kesejahteraan (*well-being*) individu yakni persepsi kesehatan (Cho et al., 2011). Penelitian oleh Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa Ternyata indikator lain seperti kesehatan dan pendidikan menopang indeks kebahagiaan dan tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan. Orang Asia dapat dikatakan bahagia apabila berpenghasilan tinggi di atas rata-rata, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi untuk mendukungnya, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Kesehatan fisik biasanya digunakan untuk mengukur kebahagiaan individu sehingga bisa dikatakan bahwa semakin bahagia seseorang ketika seseorang semakin sehat dan seberapa positif mereka melihat kesehatannya. Sofa (2017) juga meneliti bahwa adanya pengaruh antara kesehatan terhadap kebahagiaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin diakui secara luas bahwa ukuran tingkat kesejahteraan penduduk penting untuk dicermati, indikator kesejahteraan disusun tidak hanya untuk menggambarkan kondisi kemakmuran material (*welfare* atau *well-being*) saja, tetapi juga lebih mengarah kepada kondisi subjektif (*subjective well-being*) atau kebahagiaan (*Happiness*) (Badan Pusat Statistik, 2015). Berbagai penelitian tentang kebahagiaan menunjukkan bahwa fenomena kebahagiaan penduduk akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan perkembangan sosial dan pembangunan di masyarakat. Indeks kebahagiaan mempunyai cakupan dan makna yang juga melingkupi pada kondisi kehidupan yang bermakna, jadi tidak hanya pada keadaan hidup yang baik.

Tabel 1. 3 Rata-Rata Indeks Kebahagiaan, Pendidikan, Kesehatan serta Rumah&Aset Pulau Sumatera

No	Provinsi	Indeks Kebahagiaan	RRL	TPT	UHH	Kepemilikan Rumah (milik sendiri)
1	Aceh	70,23	9,30	7,30	69,61	80,42
2	Sumatera Utara	68,88	9,45	6,05	68,55	67,87
3	Sumatera Barat	70,19	8,92	6,20	68,90	69,40
4	Riau	70,85	9,02	5,73	71,14	69,59
5	Jambi	72,24	8,52	4,68	70,80	81,99
6	Sumatera Selatan	70,70	8,28	4,78	69,36	80,78
7	Bengkulu	69,26	8,82	3,62	68,79	81,93
8	Lampung	69,69	8,08	4,60	70,11	88,02
9	Kep. Bangka Belitung	71,15	8,01	4,65	70,13	83,73
10	Kep. Riau	73,44	10,01	7,92	69,58	66,81
Rata-Rata		70,66	8,84	5,55	69,70	77,05

Sumber : Olah Data

Berdasar pada latar belakang yang sudah dijabarkan, maka peneliti akan mengkaji determinasi indeks kebahagiaan provinsi-provinsi di pulau sumatera melalui pendekatan sosial ekonomi yang mana indeks kebahagiaan terdiri dari sepuluh domain kepuasan terhadap tingkat kehidupan, dengan komponen utamanya adalah tingkat kepuasan hidup individu (life satisfaction). Namun, peneliti hanya akan melihat empat dari sepuluh aspek domain tersebut untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan, pengangguran, kesehatan serta kondisi rumah dan aset. Menurut Margaretha Ari dalam Muhaimin et al., (2023) bahwasanya mendiskusikan kebahagiaan apalagi mengukur kebahagiaan harus diakui bukan hal sederhana. Hal ini disebabkan karena kebahagiaan adalah variabel laten yang harus diukur melalui variabel-variabel pembentuknya. Sekalipun kebahagiaan bersifat persepsi, tetapi pengukuran secara kuantitatif dapat dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “Determinan Sosial Ekonomi Indeks Kebahagiaan Provinsi-Provinsi Di Sumatera”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana deskripsi determinan sosial ekonomi indeks kebahagiaan Provinsi-Provinsi di Sumatera ?
2. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, umur harapan hidup serta status kepemilikan rumah milik sendiri terhadap indeks kebahagiaan Provinsi-Provinsi di Sumatera ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis determinan sosial ekonomi Indeks Kebahagiaan Provinsi-Provinsi di Sumatera.
2. Menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, umur harapan hidup serta status kepemilikan rumah milik sendiri terhadap Indeks Kebahagiaan Provinsi-Provinsi di Sumatera.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai sumber informasi tambahan ilmu ekonomi, Sumber Daya Manusia dan kependudukan, serta sebagai tambahan referensi untuk pengembangan ilmu ekonomi atau masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan indeks kebahagiaan.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu untuk pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan, serta untuk stake holder terkait dengan penelitian ini.